

# **BAB III**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD)  
KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2025**

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kerangka ekonomi dan keuangan menggambarkan secara umum kondisi dan analisis statistik serta karakteristik perekonomian dan keuangan tahun anggaran sebelumnya dan prediksi perekonomian tahun anggaran berjalan. Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Pacitan dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi ekonomi daerah serta realisasi anggaran yang ada.

Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025. Pada bab ini juga membahas tentang tantangan dan perkiraan pendapatan serta kemampuan keuangan Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di Tahun 2025.

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pacitan tahun 2025 mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD Jawa Timur Tahun 2025.

Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan.

##### **3.1.1. Kondisi dan Arah Perekonomian Nasional**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh sebesar 5,05%, sedikit melambat dibanding Tahun 2022 sebesar 5,31%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%, diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,52%, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,64%. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,30% dan 4,85%.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025 diperkirakan sebesar 5,1%-5,5%, ditopang terkendalinya inflasi,

penguatan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM.

Pemerintah menetapkan tema untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Penetapan tema tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) kebijakan pembangunan pada RKP 2025 yaitu:

1. Kebijakan Kewilayahan
  - a. Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi
  - b. Pengelolaan Pusat Pertumbuhan
2. Kebijakan Umum
  - a. Penguatan fondasi keuangan daerah
  - b. Percepatan Reforma Agraria
  - c. Penuntasan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  - d. Optimalisasi Penerapan Desentralisasi Asimetris
  - e. Penyediaan Data dan Informasi Geospasial Dasar dan Tematik
3. Infrastruktur dan Layanan Dasar
  - a. Pelaksanaan Wajib Belajar 13 tahun, serta Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
  - b. Pengembangan Konektivitas Dasar
  - c. Peningkatan Ketahanan Sumber Daya Air Berbasis Alam (Nature-based Solution)
  - d. Reformasi Pengelolaan Sampah
  - e. Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi
  - f. Peningkatan Akses Rumah Tangga Terhadap Hunian Layak
  - g. Memperkuat Sarana dan Prasarana Publik dan Hunian Berketahanan Bencana
  - h. Pemerataan Pelayanan Ketenagalistrikan dan Penuntasan Konektivitas Digital

Dengan tema dan kebijakan tersebut, Pemerintah menetapkan target sasaran pembangunan pada RKP Tahun 2025 antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3%-5,6%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5%-5,0%;
3. Tingkat kemiskinan pada kisaran 7,0%-8,0%;
4. Gini rasio pada kisaran 0,379-0,382.

RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

### **3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur**

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. RPD tersebut merupakan dokumen perencanaan transisi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur pada Tahun 2025-2026 yang harus disusun dikarenakan RPJMD Provinsi Jawa Timur berakhir pada Tahun 2024.

Untuk mendukung dan mewujudkan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Jawa Timur menetapkan Tema RKPD Tahun 2025 adalah **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan Rancangan Arah Kebijakan Pembangunan yang dirumuskan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi Pembangunan Tahun 2025, yaitu

1. Strategi Penguatan Daya Saing dan Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi;
2. Strategi Peningkatan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman dan Perluasan Jaringan Irigasi;
3. Strategi Memperluas Jaringan Transportasi Untuk Mendukung Pusat-pusat Pertumbuhan;
4. Strategi Penciptaan Iklim Usaha Penanaman Modal yang Kondusif;
5. Strategi Peningkatan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman dan Perluasan Jaringan Irigasi;
6. Strategi Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
7. Strategi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Akses Kesempatan Kerja;
8. Strategi Peningkatan Akses, Mutu Pelayanan Sektor Pendidikan dan Kesehatan;
9. Perluasan Sarana Prasarana dan Pelayanan Kesehatan serta Mendorong Masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana;
10. Strategi Peningkatan Jumlah Warisan Budaya Benda dan Tak Benda;
11. Strategi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
12. Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
13. Strategi Penguatan Pemahaman Wawasan Nusantara kepada Masyarakat;
14. Strategi Pemenuhan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
15. Strategi Optimalisasi Mitigasi dan Ketanggap Daruratan Bencana.

Berdasarkan tema dan rumusan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan target sasaran Pembangunan antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,10%-5,41%;
2. Presentase Penduduk Miskin pada kisaran 9,95%-9,75%;
3. Indeks Gini pada kisaran 0,381-0,386;
4. Indeks Pembangunan Gender pada kisaran 92,47%-93,47%;
5. Indeks Pembangunan Manusia pada kisaran 75,70-75,79;
6. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran 3,93%-4,49%;
7. Indeks Reformasi Birokrasi pada kisaran 81,80-82,40;
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada kisaran 69,59-69,96; dan
9. Indeks Resiko Bencana pada kisaran 99,65-100,65

### **3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pacitan**

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Pacitan antara lain:

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih di atas rata-rata angka kemiskinan provinsi dan nasional;
2. Pemenuhan terhadap kebutuhan ketersediaan Pelayanan Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik dan Infrastruktur lain;
3. Pendapatan Asli Daerah yang minim yang menyebabkan tingkat kemandirian pengelolaan keuangan menjadi sangat terbatas;
4. Kualitas pembangunan Manusia masih berada pada level sedang sehingga perbaikan pada sektor Pendidikan, Kesehatan, serta perekonomian masyarakat harus mendapatkan perhatian dan prioritas; dan
5. Ketimpangan pengeluaran penduduk pada level sedang menyebabkan pengeluaran penduduk menjadi kurang merata.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tema RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2025 adalah **"Integrasi Pembangunan Pusat-Daerah dan Penguatan Pembangunan Berbasis IT"**. Tema RKPD tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan Tahun 2025 yaitu:

1. Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah;
2. Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik;
3. Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal;
4. Pengembangan *Internet of Things (IoT)* dalam Segala Bidang Pembangunan;
5. Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045).

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2025 maka target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2025 antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,25%;
2. Tingkat Kemiskinan pada kisaran 10,66%;
3. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 71,98;
4. Gini Rasio pada kisaran 0,26;
5. Indeks Reformasi Birokrasi pada kisaran 77,34;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran 1,8%;
7. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada kisaran 89,4%.

Sedangkan sasaran pada pembangunan RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2025 adalah:

1. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas;
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan;
3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Dan Pendapatan Masyarakat;
4. Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan;
5. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
6. Meningkatnya Nilai Investasi;
7. Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif.

Arah kebijakan ekonomi maupun pembangunan di Kabupaten Pacitan relevan dengan Arah Kebijakan Ekonomi dan pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025, diantaranya:

1. Akselerasi dan pemretaan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi
2. Mendorong investasi
3. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing
4. Pengembangan kegiatan ekonomi pada sektor pertanian melalui hilirisasi industri agro
5. Standarisasi kualitas produk dan SDM serta peningkatan promosi dan Kerjasama ekonomi
6. Peningkatan akses Masyarakat terhadap layanan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan
7. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah
8. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan Kawasan permukiman
9. Peningkatan SDM melalui Pendidikan vokasional
10. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko

11. Peningkatan KAD dalam pengembangan Kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan

#### **3.1.4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Pacitan**

Gambaran indikator makro Kabupaten Pacitan terdiri atas pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto, ketenagakerjaan serta tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Pacitan yang diuraikan sebagai berikut.

##### **a. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan**

Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah menentukan kemajuan daerah tersebut. Kabupaten Pacitan perkembangan Pertumbuhan Ekonomi mulai tahun 2021–2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2021 capaian pertumbuhan ekonomi hanya di angka 2,49% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 5,54% dan turun pada tahun 2023 di angka 4,46%. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum stabil ini dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya meliputi:

**Ketimpangan Pembangunan:** Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara daerah yang maju dan terbelakang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu berupaya untuk mengurangi kesenjangan ini melalui kebijakan pembangunan yang berpihak kepada daerah-daerah terpinggirkan.

**Grand Design Ekonomi Kabupaten Pacitan:** Tematik Pariwisata dapat menjadi pengungkit yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan. Dalam pembangunan Sektor Pariwisata sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan kolaborasi antar berbagai Perangkat Daerah, sektor swasta dan masyarakat. Penyusunan Grand Design Tematik Pariwisata di Kabupaten Pacitan menjadi sebuah Road Map untuk mengetahui siapa berbuat apa dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

**Infrastruktur yang Terbatas:** Ketersediaan infrastruktur yang terbatas, seperti jalan raya, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, dapat menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kekurangan infrastruktur tersebut dapat mengurangi daya saing daerah dan membatasi akses terhadap pasar dan sumber daya.

**Akses Terhadap Modal:** Keterbatasan akses terhadap modal, baik dalam bentuk investasi maupun kredit, dapat menjadi penghambat bagi pertumbuhan sektor bisnis lokal. Kurangnya akses terhadap modal dapat menghambat inovasi, ekspansi usaha, dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan.

**Keterampilan Tenaga Kerja:** Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terdidik sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, di beberapa daerah, terdapat kesenjangan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan ketersediaan keterampilan yang dimiliki oleh penduduk lokal.

**Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam:** Daerah-daerah yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam dapat menghadapi tantangan serius dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ancaman seperti banjir, kekeringan, atau badai dapat merusak infrastruktur, mengganggu produksi pertanian, dan menghancurkan sumber daya alam.

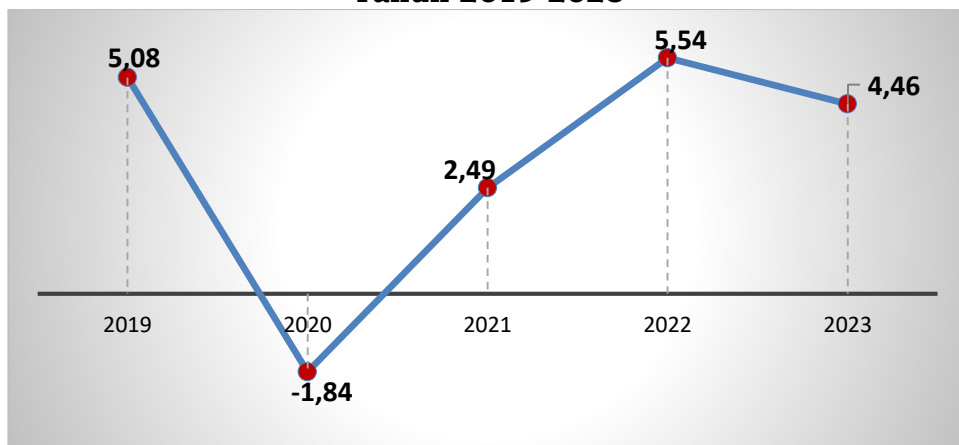
**Kebijakan Pemerintah Daerah:** Kebijakan pemerintah daerah yang tidak kondusif, birokrasi yang berbelit-belit, korupsi, atau kurangnya transparansi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan sektor swasta. Perlunya reformasi kebijakan dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah menjadi penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

**Kemitraan dan Kolaborasi:** Kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga akademis dapat menjadi kunci untuk mengatasi berbagai isu pertumbuhan ekonomi daerah. Kemitraan yang kuat dan kolaboratif dapat memperkuat kapasitas lokal, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan menciptakan peluang baru untuk pembangunan ekonomi.

Selain itu, sesuai dengan Draft RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045, pendekatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pacitan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi hijau dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keadilan sosial dengan tetap memperhatikan pengurangan risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. Hal ini melibatkan transformasi ekonomi yang menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan mendorong efisiensi sumber daya, mengurangi emisi karbon, dan melindungi ekosistem dengan fokus pada pengembangan ekowisata.

Gambaran terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini:

**Grafik.G-III.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan (%)**  
**Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, 2024

Meskipun mengalami pelambatan, namun secara garis besar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan tahun 2023 terjadi di seluruh lapangan usaha.



Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan adalah Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,15%, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,51%. Sementara lapangan usahanya lainnya tumbuh positif dengan nilai kurang dari 10% yaitu sebesar 9,00%.

Struktur perekonomian Pacitan pada tahun 2023 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Lapangan usaha tersebut menyumbang 27,00% PDRB Kabupaten Pacitan. Lapangan Usaha dengan kontribusi besar selanjutnya adalah Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reperasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,99%; Konstruksi sebesar 14,92%; Industri Pengolahan sebesar 7,35%; Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,79%; serta Pertambangan dan Penggalan sebesar 5,51%. Sementara lapangan usaha lain memberikan kontribusi kurang dari 5%. Lapangan usaha dengan kontribusi terendah adalah Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,03%; Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,09%; dan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 0,27%.

Tantangan pertumbuhan ekonomi pada sub sektor pertanian ke depan semakin besar. Meskipun lapangan usaha tersebut menyumbang 27,00% PDRB Kabupaten Pacitan, akan tetapi semakin tahun kontribusinya semakin menurun.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari sektor atau lapangan usaha yang mengalami kenaikan atau penurunan dapat dilihat pada tabel laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha sebagai berikut:

**Tabel.T-III.1**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019–2023**

SEKTOR		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	-0,09	3,80	-1,41	4,44	0,24
B	Pertambangan dan penggalan	2,36	-6,66	1,95	3,87	6,95
C	Industri pengolahan	5,90	-6,69	6,36	6,80	7,76
D	Pengadaan listrik dan gas	6,13	-0,10	1,88	6,86	16,15
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,79	3,46	6,81	3,69	2,05
F	Konstruksi	8,38	-6,18	1,68	7,13	6,08
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	7,63	-4,31	5,16	5,52	5,88
H	Transportasi dan pergudangan	8,72	-4,97	11,92	15,49	9,51
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	8,13	-9,25	4,58	15,64	5,84
J	Informasi dan komunikasi	7,83	7,81	6,41	4,81	4,38
K	Jasa keuangan dan asuransi	3,83	-0,80	0,36	2,59	3,62
L	Real estate	5,01	2,91	3,87	5,19	2,53
M, N	Jasa perusahaan	6,83	-7,48	1,47	5,28	7,87

SEKTOR		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,39	-2,09	-2,03	0,40	0,19
P	Jasa pendidikan	7,26	1,78	1,09	0,36	5,00
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	7,26	9,76	5,03	3,57	5,62
R, S, T, U	Jasa lainnya	6,83	-15,58	4,71	11,90	9,00
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5,08</b>	<b>-1,84</b>	<b>2,49</b>	<b>5,54</b>	<b>4,46</b>

Sumber: Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2024

Prekonomian Kabupaten Pacitan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2021 dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel.T-III.2**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan**  
**Tahun 2019 s/d 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (Rp.Juta)	15.961,91	15.785,20	16.381,24	17.986,46	19.490,50
PDRB ADHK (Rp.Juta)	11.040,77	10.837,87	11.107,40	11.722,43	12.244,97

Sumber: Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2024

#### **b. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

TPT Kabupaten Pacitan pada bulan Agustus 2023 sebesar 1,83%. Jumlah tersebut turun 1,82% dibanding pada bulan Agustus 2022. Hal tersebut berarti terdapat sekitar satu sampai dua orang penganggur dari setiap 100 orang Angkatan kerja.

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia disebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Selanjutnya tenaga kerja dipilah menjadi dua kelompok ialah kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk yang menerima pendapatan. Kelompok bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu bisa menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga menjadi masuk dalam kelompok angkatan kerja.

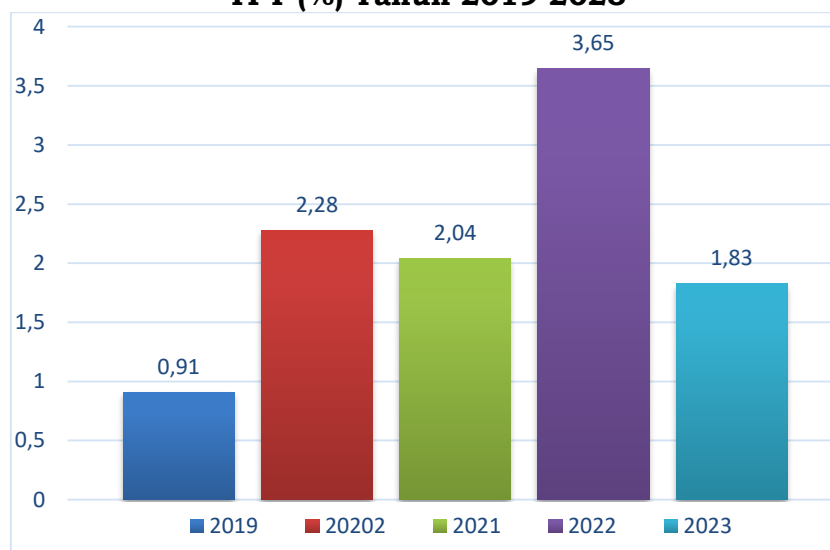
Pada bulan Agustus tahun 2023 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pacitan sebanyak 394.710 orang yang mengalami kenaikan sekitar 3,52% dibanding tahun 2022. Jumlah penduduk yang bekerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Jumlah

angkatan kerja pada tahun 2023 terdiri dari 367.350 orang yang bekerja sedangkan sebanyak 13.920 orang menganggur.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia Kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK di Kabupaten Pacitan pada bulan Agustus 2023 sebesar 81,64%, turun 1,35% dibanding tahun 2022. Peningkatan partisipasi angkatan kerja ini memberikan gambaran peningkatan penduduk yang masuk dalam dunia kerja karena tidak sedang sekolah atau mengurus rumah tangga.

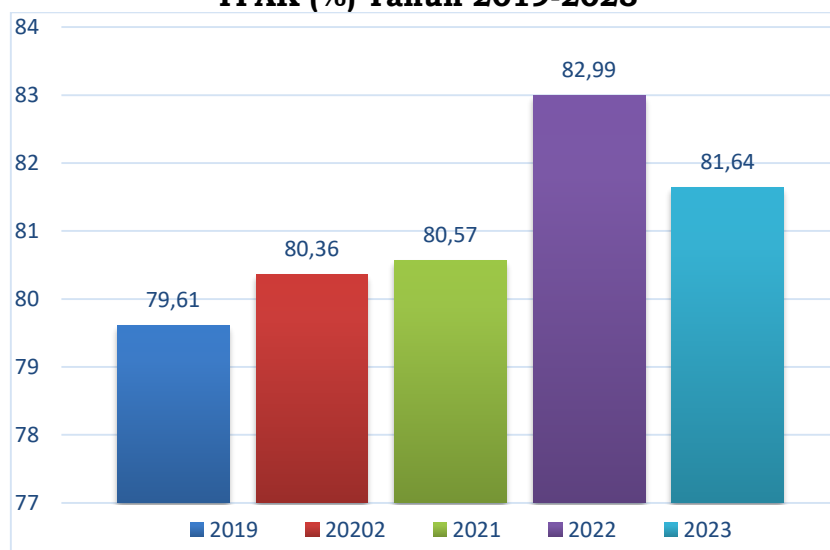
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pacitan selama 2019-2023 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:

**Grafik.G-III.2**  
**TPT (%) Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2023

**Grafik.G-III.3**  
**TPAK (%) Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2023

Komposisi penduduk yang bekerja pada setiap sektor lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan masing-masing sektor dalam penyerapan tenaga

kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2023 masih didominasi oleh sektor Pertanian sebesar 49,92%. Sektor Jasa dan sektor Manufaktur menempati urutan kedua dan ketiga dengan kontribusi masing-masing sebesar 32,28% dan 17,80%.

Persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel.T-III.3**  
**Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama**  
**Tahun 2019-2023**

Tahun	Lapangan Usaha		
	Pertanian	Jasa-jasa	Manufaktur
2019	55,46%	27,53%	17,01%
2020	59,00%	25,85%	15,16%
2021	58,82%	28,50%	12,86%
2022	49,14%	32,66%	18,20%
2023	49,92%	32,38%	17,80%

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, 2024

### **c. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan 2025**

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan memperhatikan kinerja perekonomian adalah untuk meningkatkan dan terus menjaga momentum di masa lepasnya dunia dari pandemi Covid-19.

Pemerintah pusat optimis melaksanakan kebijakan dengan konsisten dan membangun kerja sama dengan seluruh komponen bangsa. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun harus didukung penuh oleh Pemerintah Daerah sebagai peran utama pada pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia saat ini. Pemerintah Daerah berperan strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya saat Pandemi terjadi. Pemerintah Daerah mempunyai tolak ukur utama guna mendorong pemulihan perekonomian yaitu kebijakan yang telah dirancang dalam APBD.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk menekan inflasi salah satunya dengan diadakannya operasi pasar murah untuk masyarakat. Pengendalian inflasi pangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional.

Pemerintah Kabupaten Pacitan memproyeksikan di tahun 2025 sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki prospek yang akan terus meningkat karena Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan kebijakan untuk sektor tersebut terus tumbuh sehingga ditargetkan perekonomian Kabupaten Pacitan akan dapat tumbuh diatas 5% dengan tetap bertumpu pada pertumbuhan sub sector penyediaan akomodasi dan makan minum.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 31 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain PAD yang sah.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan bertumpu pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan agar lebih fokus dalam penanganan isu dan permasalahan strategis secara tepat.

### **3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh Daerah. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Ada 3 (tiga) sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Pacitan yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).
2. Sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan (Khusus). Pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri dari dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan bagi hasil pajak dan Pendapatan bagi hasil lainnya.
3. Sumber pendapatan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan tahun 2023 meliputi:

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari pengelolaan potensi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli daerah Kabupaten Pacitan dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan serta

prakiraan masing-masing potensi jenis PAD. Potensi-potensi sumber PAD baru yang sesuai dengan peraturan perundangan perlu digali untuk menambah sumber PAD. Disamping itu mengoptimalkan pengelolaan sumber PAD yang sudah ada menjadi prioritas peningkatan kemampuan keuangan daerah.

**Tabel.T-III.4**  
**Realisasi PAD Tahun 2021-2023**  
**dan Proyeksi PAD Tahun 2024-2025**

NO	URAIAN	REALISASI			PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>200.687.644.604</b>	<b>165.244.644.989</b>	<b>213.298.759.558</b>	<b>209.760.650.300</b>	<b>248.739.733.318</b>
-	Pajak Daerah	35.199.255.616	42.183.025.370	43.434.445.241	49.991.877.300	78.851.514.318
-	Retribusi Daerah	36.807.595.000	26.871.664.101	18.118.798.660	51.475.258.215	58.194.735.650
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000	2.890.377.322	2.956.298.187	2.900.000.000	3.000.000.000
-	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.080.793.988	93.299.578.196	148.789.217.470	105.393.514.785	108.693.483.350

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan dapat dihitung dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD Kabupaten Pacitan tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 29,08%. Pada tahun 2024 PAD Kabupaten Pacitan diproyeksikan turun sebesar 1,7% dari penurunan Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan pada tahun 2025 diproyeksikan mengalami kenaikan 18,6% sebagai dampak beralihnya mekanisme Bagi Hasil Pajak Daerah menjadi Opsen Pajak Daerah.

Berdasarkan proyeksi PAD Kabupaten Pacitan tersebut, maka kapasitas fiskal tahun 2025 sebesar Rp.248.739.733.318,00, sedangkan kebutuhan fiskal Kabupaten Pacitan tahun 2025 sebesar Rp.917.224.206.143,00 berasal dari Anggaran Kesehatan, Anggaran Pendidikan, Anggaran Infrastruktur, Anggaran Keamanan, Anggaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, Anggaran Operasional Kantor, Anggaran Bantuan Sosial, Anggaran Program Kesejahteraan, Anggaran Lingkungan Hidup, Anggaran Pariwisata dan Kebudayaan dan Anggaran Cadangan Darurat. Dari data tersebut celah fiskal Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 sebesar Rp.668.484.472.825,00. Ini menunjukkan selisih antara total kebutuhan fiskal yang dianggarkan dan kapasitas fiskal dari PAD yang bisa dihasilkan. Semakin besar celah fiskal ini, semakin besar pula kebutuhan transfer dari pemerintah pusat ke daerah untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang telah direncanakan.

Kurangnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya di dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak daerah; Wajib Pajak tidak membuat laporan keuangan atas usahanya dan laporan yang disampaikan kepada

petugas tidak transparan; Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas kewajiban perpajakan daerah yang masih kurang; Usaha yang sudah tidak ditemukan di lapangan atau berpindah kepemilikan tetapi wajib pajak tidak melaporkan; dan Belum ada petugas yang memiliki kompetensi diklat pemeriksaan pajak daerah, menjadi penyebab/penghambat pencapaian PAD belum sesuai harapan.

Berdasarkan permasalahan PAD yang telah diuraikan diatas, dirumuskan faktor pendorong/strategi yang berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD. Adapun faktor pendorong/strategi peningkatan PAD antara lain :

1. Tahun 2022 telah dilakukan pendataan ulang bangunan terhadap PLTU Sudimoro dan memberikan kontribusi kenaikan PBB-P2 cukup besar. Sementara pada tahun 2023, dilaksanakan penilaian terhadap menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) oleh lembaga yang memiliki legalitas untuk menilai objek bangunan tersebut. Selanjutnya pendataan baru maupun pendataan ulang bangunan dengan karakteristik khusus atau Non-Standar (seperti menara Telekomunikasi, bangunan SPBU, atau Pabrik) juga akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Peningkatan PBB-P2 dapat ditentukan dari perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan 2 komponen dasar perhitungan (Nilai Kelas Bumi dan Nilai Kelas Bangunan). Kelas Bangunan memiliki 2 kategori yaitu Penilaian Kelas Bangunan Standar dan Non-Standar (dilakukan oleh Tim Penilai dengan legalitas dari Lembaga Pemerintahan atau yang diakui oleh Pemerintah). Tahun 2023 telah dilakukan pendataan dan penilaian atas bangunan dengan kategori Kelas Bangunan Standar (8 Kecamatan) dan 4 Kecamatan pada tahun 2024 dengan melibatkan tim Desa/Kelurahan. Selanjutnya, dapat dilakukan pendataan ulang kembali pada objek-objek bangunan tersebut pada kategori objek bangunan Baik dan objek bangunan Sangat Baik dengan kriteria, objek bangunan tersebut di wilayah Kecamatan Kota atau Ibukota Kecamatan diluar Kecamatan Kota dengan tingkat perputaran ekonomi yang cukup tinggi.
2. Peningkatan Pajak Daerah Non PBB-P2 akan dilakukan Pemerintah Daerah melalui sosialisasi dan evaluasi Tata Kelola Pajak Daerah melalui Pendataan Ulang maupun pendataan baru terhadap objek-objek pajak tersebut, sehingga akurasi data dan potensi wajib pajak yang ada di lapangan dapat terus diupayakan peningkatannya termasuk pada OPSEN PKB dan OPSEN BBNKB dimana mulai tahun 2025 telah menjadi tugas pemerintah daerah dan akan masuk menjadi potesi PAD

## **2. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi



Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi.

DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten. DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Untuk tahun 2024, sebagaimana kebijakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, DAU dari pemerintah pusat akan tetap difokuskan pada belanja di urusan pendidikan, kesehatan, pemerintahan umum, kebijakan pengangkatan P3K serta dana kelurahan, sehingga pemerintah daerah akan mengikuti ketentuan DAU yang ditentukan penggunaannya tersebut.

### **3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan. Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Pacitan tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah di Kabupaten Pacitan berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional;
2. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara:
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru
  - c. Penyesuaian besaran tarif, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - d. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak;
  - e. Meningkatkan peran aktif Perangkat Daerah yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah;

- f. Mendukung implementasi teknologi informasi secara terpadu/terintegrasi guna mengintensifkan pajak dan retribusi untuk meningkatkan sistem pemungutan pajak agar lebih optimal;
  - g. Mengevaluasi Peraturan Daerah untuk direviu sesuai perkembangan zaman.
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kabupaten Pacitan;
  4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta manajemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR);
  5. Menegakkan hukum/*lawenforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD);
  6. Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau;
  7. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan akan meningkat besarnya agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kabupaten Pacitan;
  8. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan dari Provinsi yang diasumsikan akantetap besarnya karena bersifat *given* jenis pengeluaran dan kegiatannya sudah ditentukan;
  9. Mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan Dana bagi hasil dari Provinsi diharapkanakan meningkat setiap tahunnya;
  10. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk didalamnya memberikan *reward* secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah;
  11. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BLUD serta pemanfaatan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut;
  12. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Pacitan, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban;
  13. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kesehatan fiskal, kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar

bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudahan berusaha, penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, SAKIP, inovasi pelayanan publik, dan pengelolaan sampah yang pada akhirnya untuk mendapatkan tambahan Dana Insentif Daerah (DID).

### **3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perencanaan belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Secara umum komponen belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial  
Pengalokasian Belanja Pegawai menjadi perhatian daerah karena sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) tahun 2022 Tentang Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Secara bertahap Daerah akan menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
2. Belanja Modal yang didalamnya terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
3. Belanja Tidak Terduga;
4. Belanja Transfer yang didalamnya terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 didalam dokumen RKPD Tahun 2025 diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah dilakukan sesuai dengan prioritas RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kepala dan Wakil Kepala daerah dengan mempertimbangkan ketercukupan belanja bidang kesehatan, Pemerintah Daerah akan mengalokasikan

anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah akan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;

2. Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan diutamakan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa hibah kepada KPU, Bawaslu dan petugas keamanan TNI dan POLRI;
3. Belanja operasi pada setiap SKPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2024 dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RKPD ini, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan, selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada Prioritas Pembangunan Daerah, Efisien dan Efektifitas Anggaran, Tolok ukur dan target kinerja dan Akuntabilitas.

### **3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran, Pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Realisasi pendapatan, belanja serta pembiayaan tahun 2023 dan proyeksi pendapatan, belanja serta pembiayaan tahun berjalan 2024, proyeksi tahun 2025 serta tahun 2026 dapat disampaikan sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel.T-III.5**  
**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Pacitan Tahun 2023-2026**

No. Urut	Uraian	Realisasi 2023	Proyeksi Tahun Berjalan 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026 Sesuai RPJMD disesuaikan
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>213.298.759.558</b>	<b>209.760.650.300</b>	<b>248.739.733.318</b>	<b>257.957.295.179</b>
1.1.01	Pajak Daerah	43.434.445.241	49.991.877.300	78.851.514.318	83.857.732.348
1.1.02	Retribusi Daerah	18.118.798.660	51.475.258.215	58.194.735.650	36.658.665.644
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.956.298.187	2.900.000.000	3.000.000.000	2.900.000.000
1.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	148.789.217.470	105.393.514.785	108.693.483.350	134.540.897.187
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.494.335.232.842</b>	<b>1.469.580.414.769</b>	<b>1.425.851.900.493</b>	<b>1.538.705.026.145</b>
1.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.349.500.928.821	1.358.497.523.000	1.358.487.523.000	1.463.122.815.073
1.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.834.304.021	111.082.891.769	67.364.377.493	75.582.211.072
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.583.297.787,00</b>	-	-	<b>53.383.610.075</b>
1.3.01	Pendapatan Hibah	1.583.297.787	-	-	53.383.610.075
1.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.709.217.290.187</b>	<b>1.679.341.065.069</b>	<b>1.674.591.633.811</b>	<b>1.850.045.931.398</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.223.946.365.268</b>	<b>1.256.189.937.227</b>	<b>1.222.493.896.479</b>	<b>1.125.143.829.895</b>
2.1.01	Belanja Pegawai	711.327.776.187	768.672.544.639	773.954.103.646	719.617.593.927
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.791.059.821	420.286.420.735	408.276.650.582	359.550.762.310

No. Urut	Uraian	Realisasi 2023	Proyeksi Tahun Berjalan 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026 Sesuai RPJMD disesuaikan
2.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.04	Belanja Subsidi	-	27600000	27.600.000	-
2.1.05	Belanja Hibah	61.699.129.260	66.489.371.853	37.560.355.844	37.334.467.454
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.128.400.000	714.000.000	2.675.186.407	8.641.006.204
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>244.106.642.000</b>	<b>162.372.816.515</b>	<b>170.203.467.840</b>	<b>418.573.484.298</b>
2.2.01	Belanja Modal Tanah	6.900.551.220	2.025.000.000	3.425.614.042	17.819.624.633
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.907.089.492	25.242.852.078	39.998.857.468	95.026.987.007
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.877.405.459	67.678.436.329	65.680.272.044	91.224.707.823
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	98.330.123.434	63.022.325.324	58.808.878.339	199.240.246.636
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.036.972.395	4.150.903.784	2.289.845.948	15.261.918.199
2.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	54.500.000	253.299.000	-	-
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6.648.865.691</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>
2.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.648.865.691	6.000.000.000	10.000.000.000	6.000.000.000
<b>2.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>295.718.114.627</b>	<b>274.778.311.327</b>	<b>291.894.269.492</b>	<b>330.964.402.632</b>
2.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.157.083.027	6.157.083.027	10.178.520.692	7.631.169.861
2.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	289.561.031.600	268.621.228.300	281.715.748.800	323.333.232.771
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.770.419.987.585</b>	<b>1.699.341.065.069</b>	<b>1.694.591.633.811</b>	<b>1.880.681.716.825</b>
	<b>Total Surplus/Defisit</b>	<b>-61.202.697.398</b>	<b>-20.000.000.000</b>	<b>-20.000.000.000</b>	<b>-30.635.785.427</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>177.711.543.500</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>31.635.785.427</b>
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	175.227.284.712	20.000.000.000	20.000.000.000	31.635.785.427
3.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-

No. Urut	Uraian	Realisasi 2023	Proyeksi Tahun Berjalan 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026 Sesuai RPJMD disesuaikan
3.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.04	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	2.484.258.787	-	-	-
3.1.05	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	-	-	<b>1.000.000.000</b>
3.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	1.000.000.000
3.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
3.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>177.711.543.500</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>30.635.785.427</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>116.508.846.102</b>	-	-	-

Sumber: Draft Perda Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan TA 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pacitan TA. 2024 serta RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, data diolah



# **BAB IV**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD)  
KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2025**

## **BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, serta mengacu pada RKP Tahun 2025, serta RPJMN 2020-2024 guna menjaga keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yaitu:

**“ UTAMAKAN RAKYAT”**

**“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”**

Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) misi sebagai berikut:

**Kesatu : Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;**

Misi ini dimaksudkan agar dapat mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur yang proporsional dan tepat sasaran. Meningkatkan pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan. Sehingga dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membantu mempermudah masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar. Selain itu, dengan Misi ini diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

**Kedua : Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;**

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki pendidikan yang bermutu, dengan derajat kesehatan yang baik yang pada akhirnya dapat menjadi modal pembangunan menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera dengan tetap berdasar pada nilai-nilai agama dan mengakar kepada jatidiri budaya bangsa.

**Ketiga : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas bidang pertanian, peternakan,

kehutanan rakyat, dan perikanan, optimalisasi potensi pariwisata, serta pengembangan UMKM dan Koperasi sebagai sektor unggulan yang didukung dengan kebijakan ekonomi pada sektor-sektor lain.

Termasuk di dalamnya dalam rangka mendukung pencapaian indikator Nilai Tukar Petani.

**Keempat : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani;**

Misi ini dimaksudkan agar birokrasi mampu berperan dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung misi secara professional, mampu memecahkan permasalahan secara inovatif, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misi ini juga dimaksudkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terwujud dengan adanya sinergi antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam table berikut:

**Tabel.T-IV. 1  
Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan**

<b>VISI :</b> <b>“ UTAMAKAN RAKYAT”</b> <b>“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;	1.1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan, Dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif Dan Adil	1.1.1. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas
		1.1.2. Meningkatnya Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;	2.1 Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Bahagia	2.1.1. Meningkatnya Kualilitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan
		2.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		2.1.3. Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat
		2.1.4. Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan
		2.1.5. Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat

<b>VISI :</b> <b>“ UTAMAKAN RAKYAT”</b> <b>“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
	2.2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengentasan Kemiskinan	2.2.1. Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya	3.1 Meningkatkan Daya Saing Perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sector unggulan	3.1.1. Meningkatnya PendapatanPerkapita
		3.1.2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		3.1.3. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata
		3.1.4. Meningkatnya Nilai Investasi
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani	4.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Profesional Dan Responsif	4.1.1 Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif
		4.1.2 Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah
		4.1.3 Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan
		4.1.4 Meningkatnya Kemandirian Desa

#### **4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025**

Prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Prioritas yang telah dirumuskan tersebut dikaitkan dengan sasaran pembangunan kabupaten dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Selain itu, Prioritas Pembangunan Kabupaten Pacitan juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2025 adalah :

- 1. Jalan poros kabupaten strategis menuju destinasi wisata unggulan.**
- 2. Infraspasial air minum di wilayah rawan kekeringan**
- 3. Sanitasi di wilayah lokus stunting**
- 4. RTLH pasca relokasi bencana.**
- 5. Optimalisasi SDA bendungan tukul untuk irigasi dan spasial.**

Sasaran pembangunan kabupaten tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Kepala Perangkat Daerah. Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah ***Integrasi Pembangunan Pusat – Daerah dan Penguatan Pembangunan Berbasis IT.***

#### **4.2.1 Isu Strategis**

Isu strategis pembangunan Kabupaten Pacitan selaras dan mendukung dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kabupaten Pacitan yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 tersebut, untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

##### **1. Pentingnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana**

Pembangunan Infrastruktur mempunyai peranan yang sangat vital dalam pemenuhan hak dasar masyarakat. Ketersediaan Infrastruktur dapat memberikan pengaruh pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga meningkatkan akses produktivitas sumber daya yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyediaan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, bendungan, saluran irigasi, bandara dan pelabuhan menjadi aspek yang penting, selain itu infrastruktur teknologi melalui pemerataan internet juga menjadi daya dorong yang sangat penting, dengan semakin mudahnya akses transportasi dan komunikasi dapat memudahkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Tercatat bahwa persentase jalan dalam kondisi baik pada tahun 2021 adalah sebesar 68,06% sedangkan untuk jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2021 adalah 93,72%. Infrastruktur tidak hanya dituntut untuk terpenuhi saja tetapi bagaimana konektivitasnya bisa terjamin dalam rangka menggerakkan ekonomi berbasis potensi unggulan khususnya disektor pariwisata, perikanan dan pertanian. Dalam pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, kemanfaatan, kemudahan, dan konektivitas pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan demikian akan tercipta kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Selain itu Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah maka Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu menangkap peluang dan banyaknya proyek strategis nasional yang direncanakan di Kabupaten Pacitan.

Kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Samudera serta di dominasi daerah perbukitan dan pegunungan, menyebabkan Kabupaten Pacitan menjadi salah satu kabupaten yang rawan terkena bencana alam antara lain Gempa Bumi, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Tsunami, dan Banjir. Oleh karena itu, sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana merupakan aspek yang harus ada dalam kabupaten rawan bencana. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan mutlak harus dijadikan dasar dalam tata kelola mitigasi bencana. Sosialisasi Kesiapsiagaan dan Pendidikan Mitigasi Bencana (Bencana Alam, Non-Alam dan wabah) harus dilakukan secara berkala serta menghidupkan kembali SISKLAMING dan Perondaan di lingkungan RT. Selain itu upaya penanggulangan bencana atau kesiapsiagaan berbasis komunitas juga menjadi alternatif strategi dalam rangka mewujudkan ketahanan daerah yang diiringi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana penunjang.

## **2. Tuntutan Pemenuhan Kualitas Pelayanan Pendidikan**

Upaya pemerintah dalam rangka pemenuhan layanan pemerataan kesempatan pendidikan tidak hanya terbatas dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal diperuntukkan bagi masyarakat yang terkendala masalah ekonomi, sosial, keterbatasan waktu, tempat atau alasan lainnya sehingga tidak berkesempatan mengikuti pendidikan di jalur formal yakni pendidikan menengah. Kondisi tersebut merupakan salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pacitan serta mendukung prioritas Provinsi Jawa Timur dengan kebijakan Bhakti Jatim Cerdas dan Sehat. Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan pelayanan pendidikan yang tercukupi dengan luas area yang cukup besar dan kontur geografis yang bermacam-macam. Dalam rangka menjamin pemerataan dan aksesibilitas layanan pendidikan perlu upaya pemerintah antara lain, melalui jalur afirmasi bagi siswa tidak mampu, memberikan beasiswa bagi siswa berpotensi dan siswa dari keluarga kurang sejahtera serta memperluas cakupan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum sekolah. Selain itu juga diperlukan adanya peningkatan kualitas bagi tenaga pendidik dan kemudahan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat serta peningkatan sarana dan prasana pendidikan melalui standarisasi akreditasi serta mengembangkan sistem layanan dan pembelajaran berbasis digital. Dengan tersedianya potensi alam yang melimpah dan beraneka ragam di kabupaten Pacitan, penguatan SMK pada jurusan kelautan, teknologi pertanian, dan pariwisata akan menjadi alternatif pendidikan.

### **3. Tuntutan Peningkatan Standar Kualitas Layanan Kesehatan**

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dapat dicapai dengan pembangunan kesehatan di segala lini. Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pemerintah Kabupaten Pacitan bertekad untuk meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat dengan ditentukannya berbagai kebijakan antara lain: Menekan angka kematian ibu; Meningkatkan cakupan pelayanan gizi balita dan anak; Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana penunjang di puskesmas; Menekan kasus stunting; Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan obat-obatan; Menggiatkan kampanye perilaku hidup bersih; dan Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan KB.

### **4. Tuntutan Pembangunan Infrastruktur Strategis Pengungkit Ekonomi Kabupaten Pacitan**

Pembangunan infrastruktur strategis yang menjadi prioritas pembangunan pengungkit ekonomi di Kabupaten Pacitan merupakan sebuah pilihan yang logis untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing daerah. Geografis Kabupaten Pacitan yang di dominasi pegunungan dan perbukitan menunjukkan bahwa daya tahan Kabupaten Pacitan tergantung pada ketangguhan infrastruktur yang menunjang akses destinasi pariwisata sehingga membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Kemudahan akses yang ditawarkan melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan langkah jitu untuk menarik wisatawan berkunjung ke Pacitan. Dengan meningkatnya wisatawan, perkembangan ekonomi tentunya mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Pacitan bertekad untuk meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan keselamatan jalan. Dengan meningkatnya kualitas jalan, diharapkan memikat investor untuk membuka peluang ekonomi baru di wilayah Pacitan.

### **5. Urgensi Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan sebagai Magnet Investasi untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Peningkatan PAD**

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja. Dengan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Pacitan mendorong penguatan sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian sebagai mesin penggerak ekonomi, diantaranya melalui pengembangan kawasan pariwisata, peningkatan kualitas dan kuantitas produk perikanan dan pertanian, serta pembangunan infrastruktur

penunjang aksesibilitas arus ekonomi. Sector pertanian sebagai sector penyumbang kontribusi PDRB terbesar, perlu mendapatkan perhatian. Termasuk isu-isu penanganan bencana di bidang pertanian, perlu mendapatkan perhatian. Merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku, perlu mendapatkan perhatian. Kebijakan untuk menanggulangi wabah PMK perlu untuk dipertimbangkan seperti pemberian vaksin pada hewan, kontrol terhadap migrasi hewan ternak, serta pembinaan kebersihan dan Kesehatan hewan, dan lain-lain.

Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, Kabupaten Pacitan sebagai Kawasan strategis telah menetapkan produk unggulan melalui Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 1364/KPTS/408.12/2019 dimana produk unggulan Kabupaten Pacitan adalah biofarmaka, kopi, kakao dan kelapa. Termasuk didalamnya untuk mendukung Major Project Nasional Food.

Pemerintah Kabupaten Pacitan dituntut untuk memperkuat pasar dengan mengoptimalkan penggunaan produk lokal dan mendukung pengembangan UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Pemerintah Kabupaten Pacitan diharapkan mampu meningkatkan diversifikasi pasar nasional sampai dengan pasar ekspor. Untuk itu, perlu penguatan perjanjian kerja sama perdagangan antar daerah dan internasional. Tidak menutup kemungkinan di tahun yang akan datang pasar internasional akan menjadi peluang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **6. Urgensi Akselerasi Inovasi Layanan Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Hadirnya Pemerintah**

Isu pelayanan publik saat ini merupakan isu penting dalam penyediaan layanan publik di Pacitan, dimana kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Dalam konteks pelayanan, inovasi di sektor publik menjadi mutlak karena Pacitan memerlukan percepatan atau akselerasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi sektor publik, berinovasi lebih merupakan tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan berbagai prinsip *good governance*. Bermula dari standar pelayanan yang sudah ada sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pacitan dituntut untuk menghasilkan sebuah percepatan dan efisiensi dalam hal melayani masyarakat seperti pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi digital lainnya. Pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat harus didukung dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan melalui sikap, sopan santun dan keramahan. Selain dari sisi petugas, ketersediaan dan kemudahan sarana fisik harus dikembangkan dan ditingkatkan.



## **7. Perlunya Keberpihakan pada keberdayaan dan perlindungan perempuan, anak serta penyandang disabilitas.**

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada saat ini yang sudah mencapai 68% perlu diiringi dengan upaya terus meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu perlindungan pada perempuan dan anak atas kasus kekerasan dan pernikahan dini juga patut dijadikan perhatian oleh pemerintah Kabupaten Pacitan, mengingat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, angka rasio KDRT mengalami tren peningkatan. Sehingga diperlukan upaya untuk mempercepat peningkatan advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender dan anak sehingga keberpihakan terhadap perempuan dan anak dapat terjamin. Keberpihakan pada disabilitas dan perempuan dalam rangka keberdayaan secara sosial dan ekonomi perlu dilakukan dengan pendekatan pembangunan berbasis pemberdayaan yang berkelanjutan.

## **8. Belum optimalnya penyelenggaraan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Kemiskinan masih menjadi isu yang cukup menarik di Kabupaten Pacitan dimana pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Pacitan mengalami kenaikan, Pada tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Pacitan 14,54 berada diatas angka kemiskinan Jawa Timur yakni 11,09 dan angka kemiskinan Nasional 10,19 angka tersebut juga ditunjang oleh tingginya jumlah PPKS. Melalui upaya pemerataan pembangunan maka diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat ikut andil dalam upaya pengentasan kemiskinan salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan adalah melalui bantuan sosial terhadap masyarakat yang masuk pada kategori PPKS. Solusi dalam permasalahan kemiskinan adalah melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Ketepatan sasaran dan pengawasan mutlak harus dilakukan sehingga dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat miskin. Selain itu harus didukung oleh validasi Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh pemerintah daerah secara bertahap.

## **9. Tuntutan terciptanya kondusifitas lingkungan yang aman dan tertib**

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu urusan yang memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan rasa aman guna menunjang efektifitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Untuk mewujudkan situasi kondisi masyarakat dengan tertib dan tentram dibutuhkan aturan hukum, guna menumbuhkembangkan sikap disiplin dalam berperilaku bagi setiap orang atau kelompok masyarakat, berbudi pekerti luhur, taat hukum, kesusilaan dan keagamaan sehingga terwujud harmonisasi sosial. Dalam rangka menjamin dan memberikan rasa aman bagi

masyarakat maka perlu didukung sumber daya aparatur yang berkualitas dan kapabel demi tercapainya stabilitas dalam menjalankan pemerintahan daerah.

#### **10. Pentingnya penguatan kapasitas petani, nelayan dan pelaku usaha sektor pariwisata dalam menyongsong Industri 4.0**

Perkembangan teknologi menuntut segala aspek kehidupan untuk berkembang lebih cepat dengan menyesuaikan perkembangan jaman, sektor pertanian, perikanan dan pariwisata di Kabupaten Pacitan juga diharapkan dapat bersaing dalam kemajuan penggunaan teknologi, penguatan kapasitas petani dan nelayan perlu di tingkatkan guna meningkatkan efektifitas produksi pertanian. pertumbuhan produktivitas padi dan bahan utama sektor lainnya tercatat memiliki tren yang meningkat namun belum signifikan yakni meningkat sebesar 0,35 KW/HA, sektor perikanan kelompok nelayan memiliki fluktuasi pada nilai produksinya, tercatat pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan namun meningkat pada tahun 2020. Wisatawan baik lokal maupun manca negara rata-rata memiliki pengetahuan yang cukup dinamis terkait kemajuan teknologi sehingga pelaku usaha pada sektor pariwisata juga dituntut agar dapat menyesuaikan kapasitasnya guna menyongsong industri 4.0 yakni kombinasi antara mekanisme mesin, kecerdasan buatan dan konektivitas internet. Oleh karena itu dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi maka perlu adanya peningkatan kualitas SDM yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

#### **11. Belum optimalnya penguatan Pendidikan karakter dengan integrasi Pendidikan formal dan kebangsaan**

Pendidikan karakter menjadi salah satu isu besar aspek pendidikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, hal ini menyusul adanya dampak globalisasi yang mulai mengikis budaya dan karakter bangsa, terfokusnya pendidikan pada bidang ilmu pengetahuan berdampak pada terkesampingnya nilai-nilai karakter sehingga generasi muda cenderung kurang memperhatikan norma sosial, budaya dan agama. Oleh karenanya pendidikan karakter harus tetap di tekankan agar dapat menciptakan generasi yang berwawasan tinggi melalui pendidikan formal serta berbudi luhur melalui pendidikan karakter.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah;
2. Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik;
3. Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal;
4. Pengembangan Internet Of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan;

5. Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons Atas Visi Indonesia Baru (RPJM dan RPJPN 2045).

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kabupaten Pacitan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel.T-IV. 2**  
**Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Pacitan dengan**  
**Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur**

<b>Prioritas Pembangunan Nasional 2025</b>	<b>Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2025</b>	<b>Isu Strategis Kabupaten Pacitan</b>	<b>Prioritas Pembangunan Kabupaten Pacitan 2025</b>
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemadirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi biru	Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa	-urgensi penguatan ekonomi sektor unggulan sebagai magnet investasi  - Belum optimalnya penyelenggaraan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-Integrasi orientasi pembangunan pusat dan daerah respons atas visi indonesia baru
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan  - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	- Tuntutan pembangunan infrastruktur strategis pengungkit ekonomi Kabupaten Pacitan	-Penguatan dan pemeliharaan kualitas infrastruktur daerah
Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas	- Belum Optimalnya Penguatan Pendidikan Karakter Dengan Integritas Pendidikan Formal Dan Kebangsaan	- Integrasi orientasi pembangunan pusat dan daerah respons atas visi indonesia baru
	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas sektor pendidikan dan kesehatan	- Tuntutan Pemenuhan Kualitas Pelayanan Pendidikan	
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pembangunan sektor pertanian, peternakan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan	Pentingnya Penguatan Kapasitas Petani, Nelayan Dan Pelaku Usaha Sektor Pariwisata Dalam	-Pengembangan Internet of things dalam segala bidang pembangunan

<b>Prioritas Pembangunan Nasional 2025</b>	<b>Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2025</b>	<b>Isu Strategis Kabupaten Pacitan</b>	<b>Prioritas Pembangunan Kabupaten Pacitan 2025</b>
		Menyongsong Industri 4.0	
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial		Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraann pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi	Urgensi Akselerasi Inovasi Layanan Publik Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Hadirnya Pemerintah	-Pengembangan Internet of things dalam segala bidang pembangunan
Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup	- Belum Optimalnya Penguatan Pendidikan Karakter Dengan Integritas Pendidikan Formal Dan Kebangsaan	-Integrasi orientasi pembangunan pusat dan daerah respons atas visi indonesia baru
Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		-tutuntutan terciptanya kondusif lingkungan yang aman dan tertib  - Belum Optimalnya Penguatan Pendidikan Karakter Dengan Integritas Pendidikan Formal Dan Kebangsaan	-Meningkatnya Stabilitas sosial dan politik

#### **4.2.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Timur dan Nasional**

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, telah diselaraskan dengan kebijakan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026, mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025. Arah prioritas Kabupaten Pacitan berdasarkan RKPDP Provinsi Jawa Timur yaitu Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (industri, pertanian, pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, stasiun, jalan tol, pelabuhan, jalan lintas pantai selatan). Prioritas arah kebijakan Kabupaten Pacitan yang tertuang pada RKPDP Provinsi Jawa Timur

sudah kita selaraskan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan yang ada di dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel.T-IV. 3**  
**Keselarasn Kebijakan RPJMD dan Prioritas Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Pacitan Tahun 2025**

No	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemeliharaan untuk menjaga kemandapan jalan</li> <li>- meningkatkan tingkat konektivitas</li> <li>- Meningkatkan kualitas sarana prasarana, kelancaran, dan keselamatan jalan</li> <li>- Mengakselerasi peningkatan pemerataan akses air bersih</li> <li>- Mengoptimalkan pembangunan sarana permukiman</li> </ul>	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah;
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana Pendidikan</li> <li>- Meningkatkan Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah</li> <li>- Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pengajar</li> <li>- Menekan angka kematian ibu melalui sosialisasi kesehatan ibu hamil dan pelayanan konsultasi kehamilan gratis di level desa</li> <li>- Meningkatkan cakupan pelayanan gizi balita dan anak</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana-prasarana penunjang layanan di puskesmas</li> <li>- Menekan kasus stunting</li> <li>- Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan obatobatan</li> </ul>	Pengembangan Internet of things dalam segala bidang pembangunan
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempercepat pengembangan agraris berkonsep Kawasan</li> <li>- Membangun infrastruktur sirip penghubung terhadap jalur lingkaran selatan untuk menangkap peluang pusat pertumbuhan ekonomi baru</li> <li>- meningkatkan infrastruktur pendukung industry kecil-menengah</li> </ul>	Integrasi orientasi pembangunan pusat dan daerah respons atas visi indonesia baru
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengakselerasi peningkatan penjualan komoditas unggulan</li> <li>- Menekan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui peningkatan kemudahan perizinan UMKM</li> <li>- Peningkatan kapasitas UMKM dalam rangka peningkatan kualitas manajerial, produk, dan pemasaran, serta dalam rangka memperkuat UMKM untu</li> </ul>	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal;

No	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
	<p>menyongsong revolusi industri 4.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat ekonomi sektor unggulan untuk menarik investasi daerah</li> <li>- Menyederhanakan dan memudahkan proses perijinan dengan memanfaatkan Teknologi informasi</li> <li>- Memperkuat iklim investasi dan memperluas promosi investasi</li> <li>- Meningkatkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani dan nelayan</li> <li>- Penguatan manajemen pengelolaan Koperasi dan UKM</li> <li>- Meningkatkan kemitraan pengelolaan pariwisata</li> <li>- Meningkatkan keterampilan hospitality masyarakat disekitar destinasi wisata di Kabupaten Pacitan</li> <li>- Meningkatkan profesionalitas manajemen kepariwisataan daerah</li> </ul>	
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melestarikan nilai, adat dan kebudayaan lokal Kabupaten Pacitan</li> <li>- Menekan angka kriminalitas secara optimal</li> <li>- Mengendalikan dan meningkatkan kondusifitas massa dengan membuka jejaring aspirasi yang komunikatif</li> <li>- Mengelola potensi/kerawanan konflik horizontal dengan mengoptimalkan peran FKUB dan Tokoh Masyarakat</li> <li>- Menurunkan persentase PSKS</li> <li>- Melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat miskin dan melakukan pemberdayaan sosial</li> <li>- Meningkatkan rehabilitasi sosial masyarakat</li> </ul>	Meningkatkan stabilitas sosial dan politik.

**Tabel.T-IV. 4**  
**Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan, Sasaran Pembangunan Jawa Timur dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025**

<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target Kabupaten Pacitan</b>	<b>Target Jawa Timur</b>	<b>Target Nasional</b>
Pertumbuhan ekonomi	5,25%	5,10% - 5,41%	5,10% - 5,41%
Tingkat kemiskinan	12,54%	8,90% - 9,40%	7,58% - 8,08%
Indek Pembangunan Manusia	71,98%	75,70% - 75,79%	73,99% - 74,02%
Gini rasio	0,26	0,386-381	0,386-381
Tingkat pengangguran terbuka	3,29-2,53%	4,49% - 3,90	4,49%-3,90
Perununan emisi gas rumah kaca	NA	1,00%	1,00%

Sumber data: BPS Kabupaten Pacitan Tahun 2023

**Tabel.T-IV. 5**  
**Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur, dan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025**

<b>Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP)</b>	<b>Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur</b>	<b>Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan</b>
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan	Integrasi Pembangunan Pusat-Daerah dan Pembangunan Berbasis IT

### 4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel.T-IV. 6**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2025 Yang Mendukung Prioritas Pembangunan**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
1.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemadirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi biru	Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan mendorong pemberdayaan masyarakat desa	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindustrian
				Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
						Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
				Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian



<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
						Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
					Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
						Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Program Pengelolaan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan,	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
				Perikanan Budidaya		Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
						Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Program Peningkatan Kerja sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan  - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Penguatan dan pemeliharaan kualitas infrastruktur daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Pemeliharaan Berkala Jalan	
						Rehabilitasi Jembatan	
						Pembangunan Jembatan	
						Survey Kondisi Jalan /Jembatan	
						Rehabilitasi Jalan	
						Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	
						Operasi dan Pemeliharaan Sungai	
						Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	
						Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	
						Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
						Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen	

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
						Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
						Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
						Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
						Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
						Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	
				Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perindustrian
3	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan	Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas	Integrasi orientasi pembangunan pusat dan daerah respons atas visi indonesia baru	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
	penyanggah disabilitas						
		Peningkatan pelayanan dasar berkualitas sektor pendidikan dan kesehatan				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						pengecahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	



<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
						Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
						Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	
				Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
						Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
						Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
						Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
						Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
						Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
						Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
						Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
						Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
				Program Perlindungan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
				dan Jaminan Sosial			
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan	Pengembangan Internet of things dalam segala bidang pembangunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
						Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	



<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
					(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		
						Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
						Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
					Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
				Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
						Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
						Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
					Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
						Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
5	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	Integrasi orientasi pembangunan pusat dan daerah respons atas visi indonesia baru	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
						Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
						Pemberian Layanan Rujukan	
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	
6	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi	Pengembangan Internet of things dalam segala bidang pembangunan	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	
						Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
						Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						Pengelolaan Data Kepegawaian	
					Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	
						Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
						Pengelolaan Promosi ASN	
					Pengembangan Kompetensi ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
						Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
						Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
						Pembinaan Disiplin ASN	
						Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
				Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Penyelenggaraa n Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Reviu Laporan Kinerja	
						Reviu Laporan Keuangan	
						Pengawasan Desa	
						Kerja Sama Pengawasan Internal	
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik	

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
7	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup	Integrasi orientasi pembangunan pusat dan daerah respons atas visi indonesia baru	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	



<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
				Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
						Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
						Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan	

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Daerah dan Perturan kepala daerah	
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
8	Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		Meningkatnya Stabilitas sosial dan politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
						Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
						Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
				Program Peningkatan Peran Partai	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
				Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>PRIORITAS KAB. PACITAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SKPD</b>
						Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
						Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

#### **4.2.4 Penyelarasan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Sesuai/Mendukung SPM**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dinyatakan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

Untuk mendukung, pencapaian SPM, kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah daerah antara lain:

1. Penyusunan Roadmap/Blueprint SPM;
2. Penyusunan basis data target sasaran SPM;
3. Penyelarasan perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung capaian SPM;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM secara berkala; dan
5. Penyusunan rencana tindak lanjut dan rencana aksi pencapaian SPM.

Penerapan SPM dalam kerangka Pembangunan Nasional yang akan menjadi arah kebijakan Pemerintah Daerah adalah:

1. Menetapkan SPM sebagai bagian dari Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Menjadikan SPM sebagai upaya mewujudkan penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
3. Penerapan SPM merupakan sasaran meningkatnya kinerja Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan memacu pencapaian SPM dengan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah dan terpadu.

Jenis Pelayanan Dasar yang termaksud SPM adalah sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Pacitan yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Adapun jenis pelayanan dasarnya yaitu:

- a) Pendidikan anak usia dini, yang di ampu oleh Program Pengelolaan Pendidikan. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD, Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD, dan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD.
- b) Pendidikan dasar, yang diampu oleh Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru, Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
- c) Pendidikan kesetaraan, yang diampu oleh Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dan diampu oleh Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan, Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan), dan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan.

Untuk mewujudkan dalam peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS), melalui :

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK)
- b. Angka Partisipasi Murni (APM)
- c. Angka Kelulusan (AL)
- d. Angka Putus Sekolah (APS)
- e. Angka Melanjutkan (AM)

- f. Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah
- g. Rasio Guru dibanding Murid

## 2. SPM Kesehatan

Jenis layanan standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Pacitan telah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d) Pelayanan kesehatan balita
- e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
- l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

Dari beberapa SPM Kesehatan diatas diampu oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan diampu oleh Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk sub kegiatannya terdiri dari:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
- g. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usialanjut;
- h. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetesmelitus;
- j. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwaberat;
- k. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis;



1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Hiv.

Dalam rangka memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, melalui :

- a. Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)
- b. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan
- c. prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek ) pada balita
- d. Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan
- e. Insidensi TB per 100.000 penduduk
- f. Insidensi HIV per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV Angka Keberhasilan

Terkait dengan pencegahan Penyakit Mulut Dan Kuku upaya yang dilakukan Kabupaten Pacitan antara lain melakukan pengawasan terhadap lalulintas hewan, pelarangan pemasukan hewan ternak dari daerah tertular, pemantauan terhadap pemotongan hewan di RPH dan sosialisasi mengenai penyakit PMK kepada masyarakat.

### 3. SPM Pekerjaan Umum

Jenis layanan standar pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pacitan telah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, terdapat pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
- b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, terdapat pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.

### 4. SPM Perumahan Rakyat

Jenis layanan standar pelayanan minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pacitan telah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Rehabilitasi Bagi Korban Bencana;

### 5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Jenis layanan standar pelayanan minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum

Dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pacitan telah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b) Pelayanan informasi rawan bencana;
- c) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana terhadap bencana;
- e) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

#### 6. SPM Sosial

Jenis layanan standar pelayanan minimal Bidang Sosial di Kabupaten Pacitan telah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti;
- d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Dengan melihat SPM Sosial diatas maka huruf a sampai dengan d, diampu Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Dan untuk huruf a masuk pada sub kegiatan penyediaan alat bantu, sedangkan huruf b sampai d masuk pada sub kegiatan pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat.

Sedangkan pada huruf e di ampu oleh program penanganan bencana, dengan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota, dan didukung pada sub kegiatan pelayanan dukungan psikososial.

#### 4.2.5 Kebijakan Pelaksanaan SPM dan Alokasi SPM

**Tabel T-IV.7**  
**Alokasi SPM**

No.	OPD	Pagu	Presentasi Alokasi APBD
1	Dinas Pendidikan	36.445.331.185	5,92%
2	Badan Penanggulangan Bencana	1.438.040.105	30,55%
3	Dinas Sosial	2.561.685.520	16,18%
4	Dinas PUPR	11.196.629.377	7,68%
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.583.072.500	14,32%
6	Dinas Kesehatan	3.032.126.844	1,94%
7	Puskesmas	1.726.500.000	9,08

**Tabel T-IV.8**  
**Kebijakan Pelaksanaan SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Kabupaten usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Kabupaten usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	100%	Setiap tahun
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Kabupaten usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target SPM	Batas Waktu Anggaran
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Kabupaten usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
9	Pelayanan Kesehatan	Jumlah warga Negara penderita Diabetes Melitus	100%	Setiap Tahun

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target SPM	Batas Waktu Anggaran
	Penderita Diabetes Melitus (DM)	(DM) usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Jumlah warga Negara Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah warga Negara terduga Tuberculosis (TB) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah warga Negara dengan Resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

No.	Pelayanan dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana (kebencanaan)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator SPM</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Batas Waktu</b>
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawanbencana	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator SPM</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Batas Waktu Capaian</b>
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100%	Setiap Tahun